

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian Evaluasi Manajemen Program Kesehatan Reproduksi Pada Saat Bencana di Kota Bukittinggi Sumatera Barat yaitu :

1. Komponen Input

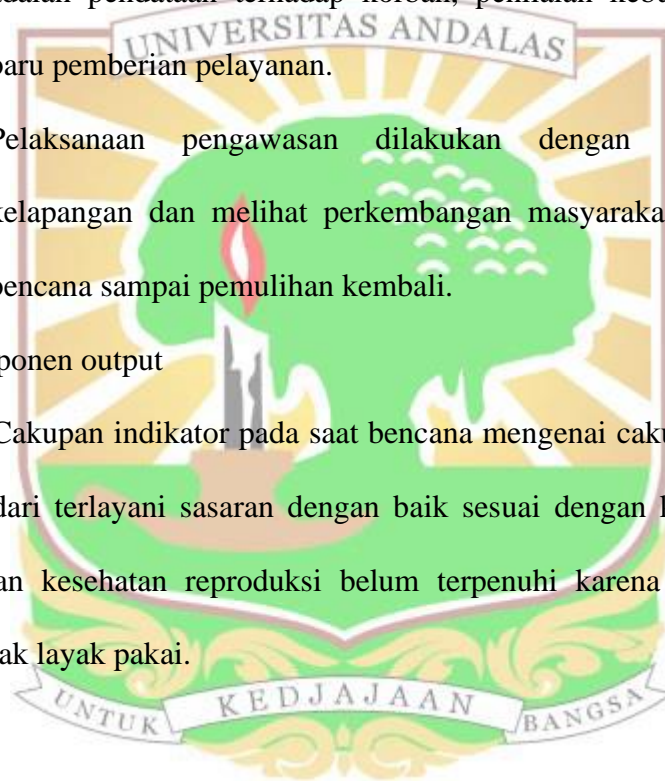
- a. Kebijakan khusus mengenai program kesehatan reproduksi pada saat bencana belum ada dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP No. 21 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Permendagri No. 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kab/kota.
- b. Sumber Daya Manusia dalam penanganan program kesehatan reproduksi tergabung kedalam tim siaga bencana kesehatan di Puskesmas, petugas kesehatan di Puskesmas dan Dinas kesehatan belum semuanya mendapatkan pelatihan.
- c. Ketersediaan dana khusus untuk kesehatan reproduksi pada saat bencana bersumber dari APBD dan APBN yang terdapat dibidang bencana dan kesehatan gizi dan keluarga di dinas kesehatan dan dana sudah mencukupi. Untuk di BPBD dana belum mencukupi.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi pada saat bencana yaitu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan tersedia di tempat penyimpanan.

2. Komponen proses

- a. Perencanaan dalam program khusus kesehatan reproduksi pada saat bencana belum ada.
- b. Tim khusus atau struktur organisasi mengenai program kesehatan reproduksi pada saat bencana belum ada. Dalam penanganan bencana kesehatan reproduksi masih masuk kesehatan secara umum.
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan pada saat bencana adalah pendataan terhadap korban, penilaian kebutuhan, kemudian baru pemberian pelayanan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dan melihat perkembangan masyarakat mulai dari saat bencana sampai pemulihan kembali.

3. Komponen output

Cakupan indikator pada saat bencana mengenai cakupan indikatornya adalah dari terlayani sasaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Untuk pelayanan kesehatan reproduksi belum terpenuhi karena terdapat logistik yang tidak layak pakai.



6.2 Saran

Saran penelitian Evaluasi Manajemen Program Kesehatan Reproduksi Pada Saat Bencana di Kota Bukittinggi Sumatera Barat yaitu :

1. Bagi pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat membuat kebijakan, SK, atau Protap khusus mengenai program kesehatan reproduksi pada saat bencana, sehingga pemenuhan kesehatan reproduksi masyarakat yang terkena dampak terjamin penanganan permasalahan kesehatan reproduksinya pada situasi bencana.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, diharapkan :
 - a. Kepala Dinas kesehatan dapat membentuk struktur organisasi khusus permasalahan kesehatan reproduksi pada saat bencana dan mensosialisasikan mengenai PPAM kesehatan reproduksi sesuai dengan bidang kerjanya.
 - b. Menunjuk satu orang koordinator dan menerbitkan SK dari Dinas kesehatan Kota Bukittinggi yang bertanggungjawab terhadap program kesehatan reproduksi pada saat bencana
 - c. Memberikan pelatihan dan simulasi rutin seperti pelatihan pengelolaan obat dan logistik, pelatihan konseling bagi situasi krisis kesehatan, pelatihan operasionalisasi dan lainnya terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan masalah kesehatan reproduksi pada saat bencana secara berkala dan rutin minimal sekali dalam setahun dengan berkoordinasi dengan BPBD.
 - d. Berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial dalam pendistribusian kit kesehatan reproduksi
 - e. Membuat SK, SOP atau protap kerja khusus kesehatan reproduksi pada saat bencana mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.
 - f. Menunjuk tenaga kesehatan untuk menangani masalah psikososial di tempat pengungsian
4. Bagi Puskesmas dan tenaga kesehatan diharapkan dapat memasukkan tim khusus kesehatan reproduksi dan seorang koordinator didalam tim siaga bencana yang sudah dibentuk oleh Puskesmas.
5. Bagi BPBD dan Dinas Sosial Kota Bukittinggi :

- a. Diharapkan untuk melakukan perencanaan secara komprehensif yakni dengan melakukan pengecekan barang logistik sebelum didistribusikan kepada masyarakat dan pengawasan secara langsung dengan turun langsung mendampingi RT/RW terhadap pemberian logistik kepada masyarakat.
- b. Berkoordinasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam hal penanganan dan pendistribusian logistik kit kesehatan reproduksi pada saat bencana.
- c. Melibatkan masyarakat seperti RT/RW/Tokoh adat/Tokoh agama dalam hal pengawasan dan pengontrolan di tempat pengungsian.

